

ABSTRAK

Kedudukan hukum Peraturan Bersama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai peraturan yang berkekuatan hukum mengikat ke dalam dan hanya berlaku bagi jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Bersama merupakan peraturan yang bersifat pelaksana dari peraturan-peraturan jajaran tersebut dalam hal menangani perkara pidana. Kedudukan hukumnya di dalam KUHAP adalah sebagai peraturan pelaksana internal jajaran tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam. Peraturan Bersama tersebut dapat dijadikan sebagai pelaksana KUHAP sehingga dapat pula dijadikan sebagai petunjuk untuk menerbitkan Surat Penghentian Pemeriksaan Penyidikan (SP3) sepanjang alasan untuk penghentiannya dikaitkan dengan alasan penghentian penyidikan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian hukum ini adalah untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan peraturan bersama tersebut diatas dalam pelaksanaan penghentian penyidikan yang terdapat pada Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Kata Kunci : Penghentian Penyidikan, Hukum Acara Pidana, Peraturan Bersama.

ABSTRACT

Legal position in the Joint Regulation legislation in Indonesia as a binding enforceable regulations in line and only applies to the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Ministry of Law and Human Rights, the Attorney General of the Republic of Indonesia, and the Indonesian National Police.

Joint Regulation is an implementing regulation of the ranks of the regulations in terms of handling criminal cases. The legal position in the Criminal Code is a regulation implementing the internal ranks that have binding force inside. The Joint Rules can be used as an executor Criminal Code so that it can also be used as a guide for issuing checks Termination of Investigation (SP3) as long as the reason for termination is associated with the termination of the investigation of reasons as specified in Article 109 paragraph (2) Criminal Procedure Code.

The legal research legislative approach and the conceptual approach. The research results of this law is to provide guidance in the implementation of the above rules together in the implementation of the cessation of the investigation contained in the Criminal Procedure Law in Indonesia.

Keywords: Termination of Investigation, Criminal Procedure, Rule Together.